
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN ISLAM

Oleh

Ismah¹, Utami Budiati²

^{1,2}UNUGHA Cilacap

Email: ismahcilacap@gmail.com, utamibudiati@gmail.com

Article History:

Received: 13-10-2021

Revised: 15-11-2021

Accepted: 22-11-2021

Keywords:

Strategi, Kepemimpinan,
Lembaga pendidikan Islam.

Abstract: *Kepemimpinan lembaga pendidikan Islam diperlukan untuk menciptakan suasana kondusif dalam membangun strategi untuk memajukan lembaga pendidikan Islam. Diperlukan juga kemampuan manajeril agar dapat mengatasi berbagai persoalan lembaga pendidikan Islam tersebut. Tugas kepemimpinan anatara lain mengarahkan, membimbing, mempengaruhi atau mengawasi perilaku pelaksana pendidikan. Untuk itu pemimpin lembaga pendidikan Islam perlu memiliki sikap keraifan dalam mengatasi berbagai persoalan.*

PENDAHULUAN

Masyarakat kita telah mengenal dan menitipkan kepercayaannya kepada pendidikan Islam baik formal dan non formal. Keduanya mempunyai peran yang saling berkaitan, sehingga keberadaan lembaga pendidikan Islam ini sampai saat ini masih menjadi alternative pendidikan bagi masyarakat bisa jadi karena masyarakat kita sudah sampai pada pengertian bahwa sebenarnya secara prinsip tidak ada dikotomi antara pendidikan agama dan umum, keduanya adalah ilmu yang harus dimiliki tanpa harus mengatakan mana yang terlebih dahulu dipelajari, pendidikan adalah salah satu syarat membangun peradaban, karena manusia sebagai sumberdayanya, maka semakin baik sutau peradaban akan ditentukan seberapa pengetahuan yang dimiliki oleh sumberdaya itu sendiri .

Maka jika kita telah sampai pada kesadaran bahwa pendidikan adalah perangkat penting bagi kehidupan, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah bagaimana kita dapat mengelola lembaga-lembaga pendidikan Islam Islam agar keberadaanya dapat mengimbangi pendidikan modern lain yang saat Ini juga mengalami kemajuan dengan kata lain pendidikan Islam harus bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. sebagai suatu lembaga tentu membutuhkan kepemimpinan yang mampu mengatasi permasalahanya dengan pendekatan dan strategi dan kebijakan yang dibangun

LANDASAN TEORI

A. Kebijakan Kepemimpinan

1. Kebijakan Kepemimpinan dalam Manajemen Berbasis Sekolah

Sejarah persekolahan di Indonesia sudah dimulai sejak jaman penjajahan dengan segala permasalahannya. Sejak Indonesia merdeka, ekspektasi negara, masyarakat, dan keluarga terhadap sekolah sedemikian besar, sehingga setiap pemerintahan di negara ini selalu menjadikan isu pendidikan dan sekolah menjadi sentral untuk menunjukkan kepada

masyarakat bahwa negara sangat “concern” dalam rangka legitimasi pemerintahannya. Dengan disahkannya UU Sisdiknas tahun 2003, terjadi pergeseran paradigma pendidikan dari sentralistik menjadi desentralistik. Pasal 51 UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20//2003 menyatakan bahwa “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan konsep pengelolaan sekolah yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di era desentralisasi pendidikan. Manajemen berbasis sekolah diharapkan mampu menjawab tantangan jaman dan ekpektasi negara, masyarakat, serta keluarga terhadap sekolah.

Kajian ini dimaksudkan untuk menyambut desentralisasi pendidikan yang dilaksanakan pemerintah, agar sekolah yang selama ini dikontrol ketat oleh pusat menjadi lebih leluasa bergerak dalam mengelola sumber dayanya, sehingga mutunya dapat ditingkatkan. Lebih kongkretnya, pembahasan ini berusaha menampilkan suatu alternatif model sekolah yang manajemennya dikelola di tingkat sekolah atau biasa disebut dengan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Namun dalam kondisi krisis saat ini, upaya mewujudkan model MBS yang ideal tidaklah mudah karena terbatasnya sumber daya. Karena kondisi tersebut, maka diajukan pencapaian tujuan MBS secara bertahap yang dibagi ke dalam strategi jangka pendek, menengah, dan panjang.

Pemberdayaan sekolah dengan memberikan otonomi yang lebih besar tersebut, di samping menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat, juga dapat dipakai sebagai sarana *Improving school efficiency*. Argumentasinya ialah, krisis ekonomi yang melanda Indonesia berdampak luas terhadap pendidikan terutama padadua segi; pertama, mengurangi kemampuan pemerintah menyediakan dana yang cukup untuk pendidikan, dan kedua, menurunkan kemampuan orang tua dalam membiayai pendidikan anaknya. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sekolah maka beban pemerintah dapat berkurang. Disamping itu, berkurangnya liku-liku birokrasi dalam prinsip desentralisasi juga mendukung efisiensi sekolah. Mengikutsertakan kepala sekolah dan guru dalam pengambilan keputusan sekolah, dapat mendorong rasa kepemilikan yang tinggi dari warga sekolah terhadap sekolahnya. Hal ini pada akhirnya mendorong mereka untuk menggunakan sumber daya yang ada secara efisien untuk mencapai hasil yang optimal.

2. Batasan Implementasi kebijakan Kepemimpinan dalam Manajemen Berbasis Sekolah

Berdasarkan pengamatan, bahwa pada dasarnya implementasi kebijakan ini terdiri dari dua lapisan pengelolaan. Lapisan pertama membahas tentang komponen birokrasi pengelolaan pendidikan, sedangkan lapisan kedua dengan uraian yang singkat merupakan komponen pengelolaan sekolah. Meskipun dalam praktiknya kedua pengelolaan tersebut untuk kepentingan sekolah sebagai muaranya, kajian ini dibatasi pada lapisan kedua, yaitu pengelolaan sekolah melalui apa yang dikenal dengan MBS.

Dimana terdapat beberapa catatan penyebab terjadinya manajemen sekolah menjadi tidak efektif, antara lain : pada umumnya kepala sekolah (khususnya sekolah negeri) memiliki otonomi yang sangat terbatas dalam mengelola sekolahnya, kepala sekolah kurang memiliki keterampilan untuk mengelola sekolah dengan baik, kecilnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sekolah, padahal perolehan dukungan dari

masyarakat merupakan bagian dari peran kepemimpinan kepala sekolah. Keterampilan ini sangat penting tatkala fungsi-fungsi pendidikan didesentralisasikan.

B. Strategi Kebijakan Kepemimpinan

Dalam kegiatan sehari-hari masalah strategi merupakan masalah yang sangat urgen, yang akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, setelah dijabarkan tujuan yang hendak dicapai. Hal demikian terjadi dalam setiap organisasi atau lembaga, dimana tidak terlepas dari penetapan strategi, yang berbeda hanyalah apakah strategi itu tepat, berjalan dengan baik, efisien, dan efektif atau memenuhi semua unsur yang perlu diperhatikan dalam hal penerapannya. Strategi adalah rencana yang disatukan dan terintegrasi, menghubungkan keunggulan strategi organisasi dan dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Strategi dimulai dengan konsep menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dalam lingkungan yang berubah-ubah.

Strategi adalah penempatan misi suatu organisasi, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan teknik tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat sehingga tujuan dan sasaran utama dari organisasi akan tercapai. Strategi merupakan wujud rencana yang terarah untuk memperoleh hasil yang maksimal. Dalam hal ini strategi dalam setiap organisasi merupakan suatu rencana keseluruhan untuk mencapai tujuan. Jadi organisasi tidak hanya memilih kombinasi yang terbaik, tetapi juga harus mengkoordinir berbagai macam elemen untuk melaksanakan kegiatannya secara efisien dan efektif.

Dengan adanya strategi, maka suatu organisasi akan dapat memperoleh kedudukan atau posisi yang kuat dalam wilayah kerjanya. Hal ini disebabkan karena organisasi tersebut mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik dalam melakukan pendekatan bagi pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan dalam wilayah kerja yang dilayaninya. Dengan demikian strategi adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir dari suatu organisasi, namun strategi bukanlah sekedar suatu rencana, melainkan adalah rencana yang menyatukan. Strategi mengikat semua bagian yang ada dalam organisasi menjadi satu, sehingga strategi meliputi semua aspek penting dalam suatu organisasi, strategi itu terpadu dari semua bagian rencana yang harus serasi satu sama lain dan berkesesuaian. Oleh karena itu penentuan strategi membutuhkan tingkatan komitmen dari suatu organisasi, dimana tim organisasi tersebut bertanggung jawab dalam memajukan strategi yang mengacu pada hasil atau tujuan akhir.

Pada kenyataannya, teknik dan kerangka dalam suatu organisasi merupakan rumusan strategi yang telah direncanakan, untuk itu sejumlah informasi yang berkaitan dengan strategi yang telah direncanakan tersebut harus dilakukan guna mengembangkan organisasi atau instansi tanpa mengabaikan kemungkinan resiko, karena manajemen strategi merupakan rangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja suatu organisasi atau instansi dalam jangka panjang yang meliputi, pengamatan lingkungan, rumusan strategi atau biasa disebut dengan perencanaan strategi jangka panjang, implemmentasi strategi dan evaluasi serta pengendalian.

Dalam hal ini manajemen strategi menekankan pada pengamatan dan evaluasi peluang dan ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan dan kelemahan suatu organisasi, namun demikian manajemen strategi tidak selalu membutuhkan proses. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengetahuan tentang manajemen strategi bagi kinerja suatu organisasi atau instansi adalah efektif dalam lingkungan yang berubah, dengan kata

lain penggunaan perencanaan strategi dan pemilihan alternatif dari tindakan berdasarkan penilaian faktor-faktor internal yang merupakan bagian terpenting dari pekerjaan pimpinan organisasi.

Aliran dari strategi menyediakan pedoman luas untuk pengambilan keputusan suatu organisasi secara keseluruhan yang merupakan kebijakan untuk menghubungkan perumusan strategi dan implementasinya. Dalam implementasi strategi diharapkan dapat mewujudkan strategi kebijakan dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur, sehingga proses tersebut meliputi perubahan budaya secara menyeluruh, struktur dan sistem manajemen dari suatu organisasi secara keseluruhan, serta diharapkan proses tersebut akan menghasilkan informasi hasil kerja yang perlu dievaluasi dan dikendalikan sebagai tindakan perbaikan dan tahapan pemecahan masalah.

Untuk mengembangkan budaya kualitas dari suatu sistem organisasi yang menghasilkan lingkungan yang kondusif bagi pembentukan dan penyempurnaan kualitas secara terus menerus yang terdiri dari filosofi, keyakinan, sikap, norma, nilai tradisi, prosedur dan harapan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penerapan strategi dalam suatu organisasi atau instansi adalah sebagai sarana untuk mencapai hasil akhir dengan merumuskan kebijakan dan teknik tertentu untuk mencapai sasaran tersebut dan memastikan implementasinya secara tepat.

Persoalan terhadap kondisi obyektif pendidikan di negeri kita hendaknya akan menjadi pemicu kita untuk menentukan solusi yang tepat, serta strategi efektif dan efisien apa yang harus kita lakukan, sehingga kita dapat meningkatkan mutu pendidikan secara simultan disemua jenis dan jenjang pendidikan¹ Strategi adalah suatu proses perencanaan yang bertujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Sebagaimana telah dijelaskan di muka, bahwa dalam prinsip manajemen, kepemimpinan merupakan kunci pokok, karena menjadi inti dari seluruh *aktivitas* manajemen. Dari meja pemimpin seluruh *aktivitas* manajemen dimulai dan pada meja tersebut *aktivitas* manajemen diakhiri. Pemimpin memegang tanggungjawab yang tertinggi dalam mensukseskan pencapaian tujuan organisasi.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai *alternatif* seperti *prioritas* program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya². Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit³. Secara alamiah dalam setiap pengambilan kebijakan oleh para penentu kebijakan maka semestinya didahului dengan adanya pemahaman yang menyeluruh mengenai terhadap masalah-masalah yang terjadi sehingga dapat dengan tepat dalam menetapkan kebijakan. Upaya untuk memahami kondisi yang ada dalam segala aspeknya dengan memanfaatkan segala data dan informasi terkait, menggunakan pendekatan ilmiah sehingga menghasilkan informasi yang diperlukan untuk menentukan kebijakan

¹ Isjoni. *Bersinergi dalam Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008. hlm. 141

² *Pengertian Kebijakan* id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan. Diakses 17 oktober 2014. 19:00

³ Masdar. *Strategi kebijakan Pendidikan Non Formal dan Formal*. <http://mastertarbiyah1982>.

Berikut ini ada empat strategi dan kebijakan Rasulullah dalam menjalankan kepemimpinannya⁴:

1. Strategi mengambil kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. tatkala mendapati perbedaan *persepsi aplikatif* para sahabat RA. atas sabda beliau tentang perintah shalat Ashar di Bani Quraidhah sepulang perang Badar. Dalam konteks ini, Rasulullah ingin menjelaskan kepada manusia bagaimana sikap terbaik ketika ada persepsi yang berbeda terhadap sebuah kebijakan terhadap suatu keputusan / kebijakan dengan pemakluman atas sikap *aplikatif* yang dilakukan oleh para sahabat beliau
2. Strategi mengambil kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika telah sampai kepada beliau sebuah kejadian pada seorang Arab Badui yang melakukan buang air kecil di dalam masjid, yang kemudian oleh Umar Bin Khatab RA. orang itu hendak diberi peringatan keras akan tetapi oleh nabi SAW justru diberi kesempatan lalu kemudian diperintahkan untuk menyiram bekas buang airnya tersebut setelah diberikan penjelasan.
3. Strategi mengambil kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam pendelegasian Muadz bin Jabal RA. ke negeri Yaman untuk berdakwah dengan merinci tahapan-tahapan dalam misi dakwah yang akan dilakukan.
4. Strategi menentukan kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada seorang laki-laki yang mengaku telah melakukan jima disiang hari pada bulan Ramadhan yang ternyata dirinya tidak mampu membayar kafarat sedikitpun.

Dan masih banyak lagi contoh tentang strategi Rasulullah dalam mengambil kebijakan baik dalam situasi formal maupun non formal. Diantara banyak strategi kebijakan Rasulullah SAW ada yang berhasil dilakukan, ada pula yang gagal karena banyak faktor yang mempengaruhi seperti sumber daya manusia yang gelap mata terhadap ghanimah dalam perang Hunain, tidak ikhlas, adanya benih kemunafikan seperti dalam perang Khandaq dan lain sebagainya.

C. Teori Kebijakan

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh seorang aktor atau beberapa aktor berkenaan dengan suatu masalah. Tindakan para aktor kebijakan dapat berupa pengambilan keputusan yang biasanya bukan merupakan keputusan tunggal, artinya kebijakan diambil dengan cara mengambil beberapa keputusan yang saling terkait dengan masalah yang ada. Pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai pemilihan alternatif terbaik dari beberapa pilihan alternatif yang tersedia. Ada beberapa teori yang paling sering digunakan dalam mengambil kebijakan yaitu :

1. Teori Rasional Komprehensif

Barangkali teori pengambilan keputusan yang biasa digunakan dan diterima oleh banyak kalangan adalah teori rasional komprehensif yang mempunyai beberapa unsur:

- a. Pembuatan keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain atau setidaknya dinilai sebagai masalah-masalah yang dapat diperbandingkan satu sama lain (dapat diurutkan menurut

⁴ Masdar. *Strategi kebijakan Pendidikan Non Formal dan Formal* . <http://mastertarbiyah> 1982.

- prioritas masalah)
- b. Tujuan-tujuan, nilai-nilai atau sasaran yang menjadi pedoman pembuat keputusan menjadi sangat jelas, tepat sasaran serta dapat diurutkan prioritasnya atau kepentingannya.
 - c. Berbagai macam alternatif untuk memecahkan masalah diteliti secara saksama.
 - d. Asas biaya manfaat atau sebab-akibat digunakan untuk menentukan prioritas.
 - e. Setiap alternatif dan implikasi yang menyertainya dipakai untuk membandingkan dengan alternatif lain.
 - f. Pembuat keputusan akan memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan, nilai, dan sasaran yang ditetapkan

Ada beberapa ahli antara lain *Charles Lindblom*, 1965 (*Ahli Ekonomi dan Matematika*) yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan itu sebenarnya tidak berhadapan dengan masalah-masalah yang konkrit akan tetapi mereka seringkali mengambil keputusan yang kurang tepat terhadap akar permasalahan. Teori rasional komprehensif ini menuntut hal-hal yang tidak rasional dalam diri pengambil keputusan. Asumsinya adalah seorang pengambil keputusan memiliki cukup informasi mengenai berbagai alternatif sehingga mampu meramalkan secara tepat akibat-akibat dari pilihan alternatif yang ada, serta memperhitungkan asas biaya manfaatnya dan mempertimbangkan banyak masalah yang saling berkaitan

Pengambil keputusan sering kali memiliki konflik kepentingan antara nilai-nilai sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat. Karena teori ini mengasumsikan bahwa fakta-fakta dan nilai-nilai yang ada dapat dibedakan dengan mudah, akan tetapi kenyataannya sulit membedakan antara fakta dilapangan dengan nilai-nilai yang ada. Ada beberapa masalah diperbagai negara berkembang seperti Indonesia untuk menerapkan teori rasional komprehensif ini karena beberapa alasan yaitu: Informasi dan data statistik yang ada tidak lengkap sehingga tidak bisa dipakai untuk dasar pengambilan keputusan. Kalau dipaksakan maka akan terjadi sebuah keputusan yang kurang tepat. Teori ini diambil/diteliti dengan latar belakang berbeda dengan negara berkembang ekologi budayanya berbeda. Birokrasi dinegara berkembang tidak bisa mendukung unsur-unsur rasional dalam pengambilan keputusan, karena dalam birokrasi negara berkembang kebanyakan korup sehingga menciptakan hal-hal yang tidak rasional.

2. Teori Inkremental

Teori ini dalam mengambil keputusan dengan cara menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan dan merupakan model yang sering ditempuh oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan. Teori ini memiliki pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- a. Pemilihan tujuan atau sasaran dan analisis tindakan empiris yang diperlukan untuk mencapainya merupakan hal yang saling terkait.
- b. Pembuat keputusan dianggap hanya mempertimbangkan beberapa alternatif yang langsung berhubungan dengan pokok masalah, dan alternatif-alternatif ini hanya dipandang berbeda secara inkremental atau marjinal
- c. Setiap alternatif hanya sebagian kecil saja yang dievaluasi mengenai sebab dan akibatnya.
- d. Masalah yang dihadapi oleh pembuat keputusan di definisikan secara teratur dan

memberikan kemungkinan untuk mempertimbangkan dan menyesuaikan tujuan dan sarana sehingga dampak dari masalah lebih dapat ditanggulangi.

- e. Tidak ada keputusan atau cara pemecahan masalah yang tepat bagi setiap masalah. Sehingga keputusan yang baik terletak pada berbagai analisis yang mendasari kesepakatan guna mengambil keputusan.
- f. Pembuatan keputusan inkremental ini sifatnya dalah memperbaiki atau melengkapi keputusan yang telah dibuat sebelumnya guna mendapatkan penyempurnaan.

Karena diambil berdasarkan berbagai analisis maka sangat tepat diterapkan bagi negara-negara yang memiliki struktur mejemuk. Keputusan dan kebijakan diambil dengan dasar saling percaya diantara berbagai pihak sehingga secara politis lebih aman. Kondisi yang realistik diberbagi negara bahwa dalam menagmbil keputusan/kebijakan para pengambil keputusan dihadapkan pada situasi kurang baik seperti kurang cukup waktu, kurang pengalaman, dan kurangnya sumber-sumber lain yang dipakai untuk analsis secara komprehensif. Teori ini dapat dikatakan sebagai model pengambilan keputusan yang membuahkan hasil terbatas, praktis dan dapat diterima.

Ada beberapa kelemahan dalam teori inkremental ini keputusan-keputusan yang diambil akan lebih mewakili atau mencerminkan kepentingan dari kelompok yang kuat dan mapan sehingga kepentingan kelompok lemah terabaikan Keputusan diambil lebih ditekankan kepada keputusan jangka pendek dan tidak memperhatikan berbagai macam kebijakan lain. Dinegara berkembang teori ini tidak cocok karena perubahan yang inkremental tidak tepat karena negara berkembang lebih membutuhkan perubahan yang besar dan mendasar. Menutut gaya inkremental dalam membuat keputusan cenderung menghasilkan kelambanan dan terpeliharanya *status quo*

3. Teori Pengamatan Terpadu (Mixed Scanning Theory)

Beberapa kelemahan tersebut menjadi dasar konsep baru yaitu seperti yang dikemukakan oleh ahli sosiologi organisasi Aitai Etzioni yaitu pengamatan terpadu (*Mixid Scaning*) sebagai suatu pendektan untuk mengambil keputusan baik yang bersifat fundamental maupun inkremental. Keputusan-keputusan inkremental memberikan arahan dasar dan melapangkan jalan bagi keputusan-keputusan fundamental sesudah keputusan-keputusan itu tercapai.

Model pengamatan terpadu menurut Etzioni akan memungkinkan para pembuat keputusan menggunakan teori rasional komprehensif dan teori inkremental pada situasi yang berbeda-beda. Model pengamatan terpadu ini pada hakikatnya merupakan pendekatan kompromi yang menggabungkan pemanfaatan model rasional komprehensif dan model inkremental dalam proses pengambilan keputusan.

1. Straregi Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidkan Islam

Masalah yang dihadapi pendidikan Islam dalam menjalan prsoses dan keputusan ,masih banyak terdapat kendala menurut pendapat Mukti Ali pendidikan menyatakan bahwa kelemahan-kelemahan pendidikan Islam di Indonesia dewasa ini lebih disebabkan oleh faktor-faktor penguasaan sistem dan metode, bahasa sebagai alat, ketajaman interpretasi, kelembagaan, manajemen, serta penguasaan ilmu dan teknologi. Berkaitan dengan hal ini, M.Arifin, juga menyatakan bahwa pendidikan Islam harus didesak untuk melakukan *inovasi* yang tidak hanya berkaitan dengan perangkat kurikulum dan manajemen, tetapi juga menyangkut dengan startegi dan taktik operasionalnya. Strategi dan taktik itu, menuntut perombakan model-model pendidikan sampai dengan institusi-

institusinya, sehingga lebih *efektif* dan *efisien*, dalam arti *pedagogis*, *sosiologis* dan *kultural* dalam menunjukkan perannya, menggambarkan situasi pendidikan Islam di Indonesia sampai awal abad ini tidak banyak berbeda dengan perhitungan kasar yang dikemukakan di atas. Sistem madrasah dan pesantren yang berkembang di nusantara ini dengan segala kelebihannya, juga tidak disiapkan untuk membangun peradaban.⁵

Ada satu pandangan lain bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam berbasis Islam tertinggal jauh dalam segala hal Pendidikan Islam menjadi satu dalam sistem pendidikan nasional, tetapi predikat keterbelakangan dan kemunduran tetap melekat padanya, bahkan pendidikan Islam sering diberi label hanya untuk kepentingan orang-orang yang tidak mampu atau miskin, memproduksi orang yang eksklusif.

Beberapa pendapat di atas bisa jadi benar, tapi pertanyaannya apakah masalah-masalah tersebut terjadi karena faktor lain atau berdiri sendiri karena kalau dilihat pendidikan di Indonesia dikenal dengan dua sistem, yaitu pendidikan umum dan pendidikan Islam, dimana masing-masing dibawah naungan Menteri Pendidikan Nasional dan Kementrian Agama. Terdapat perbedaan perlakuan pada kedua lembaga ini. Pendidikan umum lebih mendapat perhatian daripada pendidikan yang berlabel Islam. Lembaga pendidikan Islam Islam yang *notabene* di bawah naungan Kementrian Agama, kebanyakan tidak didirikan oleh pemerintah melainkan didirikan pondok pesantren maupun perorangan yang kebanyakan berupa yayasan. Model pendidikan seperti ini kemudian dalam segala urusan biasanya dikuasai oleh pemegang yayasan. Sehingga setiap lembaga pendidikan Islam berbeda dalam kebijakannya, masyarakat umum lebih mengenal sekolah negeri dan sekolah swasta, walaupun ada beberapa lembaga pendidikan Islam Islam yang negeri namun secara umum kualitasnya tetap lebih baik sekolah negeri umum.

Permasalahan di atas adalah bagian kelebihan dan kelemahan pendidikan Islam, dikatakan kelebihan ini adalah lembaga yang punya otonomi sendiri, punya aturan sendiri tanpa *intervensi* pihak lain termasuk pemerintah, sehingga dengan mudah dapat membentuk sistem pengajaran sesuai dengan kebutuhan –kebutuhan yang di inginkan. Dan sudah semestinya pemerintah mengapresiasi lembaga-lembaga pendidikan Islam ini, karena ini adalah sumbangsih masyarakat Indonesia bagi pengembangan pendidikan tanpa tergantung pada keuangan negara.

Untuk mengetahui mutu pendidikan Islam bukanlah hal yang sederhana, sebab banyak aspek yang terkait dengan mutu pendidikan tersebut. Berbagai sarana dan prasarana pendidikan hendaknya berorientasi pada peserta didik, bukan sebaliknya yang berorientasi pada kepentingan pribadi. Setidak-tidaknya ada tiga *indikator* utama yang dapat menentukan tinggi rendahnya kualitas pendidikan, yaitu dana pendidikan, kelulusan pendidikan dan prestasi yang dicapai dalam membaca komprehensif.⁶

Di sisi lain ditengah –tengah masyarakat yang semakin pragmatis dan diadakan ujian nasional (UN) dengan mata ujian tertentu saja yang diujikan kemudian menjadi tolak ukur keberhasilan dan kecerdasan siswa dan biasanya siswa yang mendapatkan nilai terbaik adalah lulusan dari sekolah negeri, dan hanya siswa inilah yang hanya dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang bermutu baik, hal semacam ini semakin menambah satu deretan

⁵ Khairul Anwar. *Masalah-masalah Internal Pendidikan Islam di Indonesia*.www.blogger.com.

⁶ Departemen Agama. *Rekonstruksi Sejarah Pendidikan Islam ndonesia*. Jakarta.2005.hlm 163

bahwa lembaga swasta dalam hal ini pendidikan Islam semakin terpuruk citranya sebagai pencipta siswa bodoh dan terbelakang.

Akan tetapi menurut penulis memahami beberapa aspek ketertinggalan mutu pendidikan sebagaimana diatas tidak dapat dipahami setengah-setengah kerana memang kondisi diatas tidak berdiri sendiri, sebagaimana contoh diatas tentang standar nilai yang didapatkan sekolah negeri dan sekolah Islam. Siswa sekolah negeri akan selamanya mendapat nilai terbaik, karena dalam hal pendanaan tidak mengalami kesulitan karena pemerintah sudah mengalokasikan anggaran yang cukup memadai dibanding sekolah swasta, dengan anggaran yang cukup juga sekolah dapat menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung yang memadai

Secara umum masyarakat juga masyarakat beranggapan bahwa lembaga pendidikan negeri adalah *alternatif* pertama dalam menentukan pilihan pendidikannya, ditambah dengan sistem perekrutannya yang ketat, hanya siswa yang punya nilai tertinggillah yang berkesempatan masuk sekolah-sekolah negeri dan sisanya harus puas masuk sekolah sekolah yang belum diisi siswa yang pintar dan cerdas, dan selanjutnya bila siswa negeri adalah anak-anak pilihan dan yang lainnya menjadi siswa kelas dua mengapa standar penilaian dengan sistem UN di berlakukan sama? Jelas “pintar” akan semakin dianggap “pintar” yang “bodoh” semakin tertinggal.

Dan bagaimana jika kondisi diatas dibalik, bahwa standar prestasi siswa diukur dengan nilai agama yang tinggi, tentu kondisi di atas akan berbeda, maka apa yang seharusnya di benahi jika salah satu sistem pendidikan kita telah menempatkan peserta didik kita menjadi obyek pelabelan.

Manusia dalam pendidikan Islam diposisikan sebagai subyek bukan sebagai obyek, sebab jika menjadi obyek didik yang terjadi adalah finansialisasi pendidikan. Keikhlasan sangat ditekankan dalam Islam. Tanpa keikhlasan akan memunculkan semangat kapitalisasi. Komersialisasi pendidikan yang terjadi saat ini, disisi lain banyak disebabkan memudahkan semangat keikhlasan itu⁷

2. Strategi dan pendekatan untuk peningkatan mutu pendidikan

Indonesia sebagai pemeluk Islam mayoritas, semestinya menempatkan pendidikan Islam sebagai pilihan, dan saatnya pemimpin pendidikan Islam mempunyai strategi baru agar lembaga pendidikan Islam Islam mendapat posisi tersendiri dalam masyarakat. maka dengan keterbatasan yang dimiliki hal-hal yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan oleh pemimpin pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Menciptakan pendidikan yang berkarakter

Menurut bahasa kamus bahasa Indonesia, karakter memiliki arti kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, menurut Ditjen Mendikdasmen-Kementrian Pendidikan Nasional: Karakter adalah cara berfikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁸

⁷ Singgih Nugroho. Pendidikan Pemerdekaan & Islam. Yogyakarta :Pondok Edukasi.2003. hlm 22

⁸Khairul Anwar. *Masalah-masalah Internal Pendidikan Islam di Indonesia*. www.blogger.com. di akses 20 oktober 2014. 14.30

Pendidikan yang berkarakter ini diwujudkan dalam nilai-nilai Islam yang diajarkan betul-betul terapkan dalam seluruh tahapan proses pendidikan dan dilakukan seluruh pelaku pendidikan juga, di jalankan terus menerus tanpa ada kesepakatan melanggarnya sehingga masyarakat semakin lama akan semakin yakin dan mempercayakan pendidikannya ke lembaga tersebut, karena sistem pendidikan ini memang terpadu disamping mendapat pendidikan umum juga mendapat pelajaran agama yang didalamnya memuat budi pekerti dan nilai-nilai dalam menjalankan kehidupan.

Secara mendasar dapat dikatakan bahwa madrasah merupakan sistem pendidikan yang mempunyai karakter yang sangat spesifik bukan hanya mempunyai tugas pendidikan dan pengajaran agama tetapi juga mempunyai tugas untuk memberi bimbingan hidup dalam masyarakat.⁹

b. Pendidikan berbasis masyarakat

Sebagaimana dijelaskan diatas, lembaga pendidikan Islam sebagian besar dibawah naungan yayasan, artinya punya otoritas sendiri mengatur kebijakan-kebijakannya, maka hal yang tak kalah pentingnya adalah pelibatan masyarakat secara umum dan masyarakat sekitar. Pelibatan ini dapat dimulai dengan bermusyawarah yang berkaitan dengan pembangunan gedung, mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan dan perekrutan peserta didik. Munculnya lembaga pendidikan Islam ditengah masyarakat adalah dua hal yang bukan terjadi sendiri, struktur masyarakat, ideologi yang dianut juga turut melahirkan keberadaan lembaga pendidikan Islam tersebut, maka akan sangat tidak mungkin bila lembaga pendidikan Islam tidak menjalin hubungan yang harmonis dalam masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses-proses kesepakatan akan memunculkan ikatan emosi yang ideal dan secara langsung atau tidak langsung turut menghidupkan lembaga pendidikan Islam tersebut.

Masyarakat itu mempengaruhi pendidikan dan kebudayaan yang dihadapinya. Pendidikan dan kebudayaan itu adalah dua hal yang mempengaruhi kondisi, situasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat.¹⁰

c. Tanggap terhadap perubahan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang amat cepat. Dalam dunia yang kompetitif, lembaga pendidikan Islam juga perlu merespon kondisi seperti ini, ketersediaan sumberdaya juga harus sebanding dengan kebutuhan masyarakat, agar pendidikan Islam tidak ditinggalkan pangsa pasarnya, dan yang harus di sadari bahwa perubahan sistem dalam dunia pendidikan akan berdampak pada aspek lain aspek lain dengan segala konsekuensinya.

Perlu kiranya kita melakukan perubahan secara sistematis pada dunia pendidikan, akan tetapi yang perlu kita ingat adalah, bahwa konsekuensi dari suatu perubahan akan berdampak terhadap banyak aspek, apakah itu alokasi dana yang harus dikurangkan, kelengkapan infrastruktur, ketersediaan sumberdaya manusianya, dan tak kalah pentingnya dampak perubahan itu terhadap mutu dan kualitas pendidikan anak didik

⁹ Fatah Syakur NC. *Manajemen Pendidikan Berbasis pada Madrasah*. Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2011, hlm. 85

¹⁰ Nazil Shaleh ahmad, penerjemah Syamsudin Asyrofi. *Pendidikan dan Masyarakat*. Yogyakarta : Sabda Media. 2011

dan masyarakat.¹¹

PENUTUP

Kepemimpinan pendidikan, proses pendidikan, masalah-masalah yang dihadapi baik *internal* maupun *eksternal* dan seluruh perangkat pendidikan, kesemuanya terjadi bukan berdiri sendiri Untuk itu butuh kinerja yang menyeluruh dari semua pihak agar pendekatan dan strategi kepemimpinan yang dibuat bisa dapat terlaksana dengan baik mendorong peningkatan mutu pendidikan Islam .

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Rohmat. Kepemimpinan Pendidikan Strategi Menuju Sekolah Efektif. Yogyakarta: Cahaya Ilmu,2010
- [2] Isjoni. Bersinergi dalam Perubahan. Menciptakan pendidikan Berkualitas di Era Global. Jakarta:Pustaka Pelajar,2008
- [3] Nazil Shaleh Ahmad. Penerjemah: Syamsuddin Asyrofi. Pendidikan dan Masyarakat.Sabda Media. 2011
- [4] Singgih Nugroho.Pendidikan Pemerdekaan dan Islam.Pondok Edukasi.2003
- [5] Dr.H.Fatah Syukur NC, M.Ag. Manajemen Pendidikan Berbasis pada Madrasah.PT Pustaka Rizki Putra 2011
- [6] Veithzal Rivai. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Raja Gofindo Persada. 2003

¹¹ Isjoni.*Bersinergi dalam Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008. hlm 18

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN